

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada awal tahun 1996 dan mencapai puncaknya pada tahun 1997 mendorong pemerintah pusat untuk melepaskan sebagian wewenang pengelolaan keuangan kepada daerah dan diharapkan daerah dapat membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat atas dasar kemampuan keuangan sendiri. Dengan kata lain, terjadinya penurunan angka penerimaan negara secara simultan telah mendorong inisiatif pemerintah pusat memberikan status otonomi kepada daerah otonom.

Pengelolaan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004 yang merupakan revisi terhadap UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kedua Undang-Undang di bidang otonomi daerah tersebut berdampak pada terjadinya pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dijadikan sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun

anggaran. Oleh karena itu, pemerintah haruslah bertindak efektif dan efisien dalam mengelola keuangan daerahnya. Untuk memberikan jaminan pengalokasian sumber daya yang ada secara ekonomis, efisien dan efektif, maka informasi akuntansi manajemen sangat penting dimiliki, seiring dengan timbulnya paradigma baru organisasi pemerintahan yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat dan kepentingan publik.

Untuk itu dalam merespon tuntutan yang semakin beragam tersebut, pemerintah daerah perlu memiliki sistem manajemen keuangan publik yang handal. Hal ini sangat penting karena buruknya manajemen keuangan publik dapat mengakibatkan anggaran publik yang tidak efektif dan efisien (seperti bocornya anggaran) dan kinerja sektor publik yang mengecewakan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan hanya bisa tercapai dengan pemanfaatan dana yang terarah untuk mengoptimalkan pelayanan publik melalui proses penganggaran yang baik.

Guna menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dapat dilakukan dengan menganalisa laporan keuangan yang sudah tersedia. Analisis laporan keuangan merupakan suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Abdul Halim, 2004: 105).

Tolok ukur kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja yang ditetapkan dalam bentuk standar pelayanan oleh masing-

masing daerah. Penilaian kinerja terhadap lembaga tidak hanya fokus pada lembaga yang berorientasi profit saja melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga nonkomersial. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dilihat dari laporan keuangannya. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan.

Perbaikan pada semua bidang juga dilakukan untuk mendukung pengembangan suatu daerah. Dalam upaya mengembangkan efisiensi dan keefektifan program serta pengalokasian sumber-sumber pada aktivitas yang menambah nilai bagi publik. Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah Pemerintah Daerah dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Keberadaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sangat penting untuk menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas publik dalam rangka kepentingan menciptakan *good governance*.

Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ini berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan, tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Ukuran kinerja yang disusun tidak dapat hanya dengan menggunakan satu ukuran, oleh karena itu perlu ukuran yang berbeda untuk

tujuan yang berbeda. Hal inilah yang kadang membuat konflik. Ukuran kinerja mempengaruhi ketergantungan antar unit kerja yang ada dalam satu unit kerja (Mardiasmo, 2002).

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur melalui beberapa rasio. Fresti, dkk (2009) menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio kontribusi, (*debt service coverage ratio*) DSCR dan rasio pertumbuhan untuk menganalisis kinerja keuangan Kota Batu. Hairunisya (2008) menambahkan rasio keserasian dan rasio belanja rutin terhadap APBD untuk menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Probolinggo.

Halim dan Jamal (2006) menggunakan rasio ketergantungan daerah, derajat desentralisasi dan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menganalisis otonomi daerah dilihat dari aspek kemampuan keuangan Kota Malang. Dan Maharani (2006) menambahkan rasio belanja operasional untuk menganalisis APBD Kantor Dinas Pendapatan Kota Batu.

Perbedaan-perbedaan alat analisis yang digunakan pada penelitian-penelitian terdahulu untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah, mendorong peneliti untuk melakukan pengujian lebih lanjut temuan-temuan empiris mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Peneliti menggunakan beberapa rasio keuangan terhadap APBD yaitu rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, derajat desentralisasi, rasio efektivitas dan efisiensi PAD, rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah, derajat kontribusi BUMD, rasio DSCR, rasio utang terhadap pendapatan daerah dan rasio efisiensi belanja,

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mencoba melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008-2010 (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, permasalahan yang dapat dimunculkan adalah “Bagaimana kinerja keuangan Disperindag Pasar Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2008-2010 dilihat dari analisis rasio keuangan APBD?”

1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis kinerja keuangan Disperindag Pasar Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2008-2010 yang diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan APBD.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi data empiris mengenai kinerja keuangan Disperindag Pasar Kabupaten Malang dan diharapkan dapat menjadi alternatif masukan untuk mengukur laporan kinerja keuangan pada Disperindag Pasar Kabupaten Malang.

2. Memberikan informasi kepada publik sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan dana publik oleh pemerintah daerah di era otonomi daerah.
3. Bagi penulis, penelitian ini merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terkait dengan keuangan pemerintah daerah dewasa ini.
4. Bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan literatur Manajemen Keuangan tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Selanjutnya dapat sebagai acuan guna penelitian lanjutan.

1.4. Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah lebih terfokus pada alat analisis yang digunakan sebagai tolok ukur kinerja keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2008-2010. Alat analisis yang digunakan adalah Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Ketergantungan Daerah, Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, Rasio Efektivitas Pajak Daerah, Rasio Efisiensi Pajak Daerah, Derajat Kontribusi BUMD, Rasio Kemampuan Mengembalikan Pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio*), Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah dan Rasio Efisiensi Belanja.